

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Teori Walras (*Output-Input Theory*)

Analisis keseimbangan umum (*general equilibrium*) adalah analisis atau studi ekonomi yang mempelajari bagaimana kondisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) berinteraksi dalam berbagai pasar secara simultan (Kusumanto, 1990). Pembuktian Walras mengenai adanya titik keseimbangan umum itu dilakukannya dengan menggunakan matematika formal. Walras menyimpulkan bahwa sejumlah fungsi *demand* tidak tergantung pada fungsi lainnya (Susilo, 1999).

Dalam periode 1930-1950an perkembangan model keseimbangan umum terapan (*applied general equilibrium model*) berkembang dengan pesat, seperti model *input-output* (I-O) Leontief (1930-an), dan model neraca sosial ekonomi (*Social Accounting Matrix* atau *SAM*). Dalam hal ini model keseimbangan umum terapan bukanlah aplikasi dari model keseimbangan umum teoritis hasil rumusan seperti yang telah diterangkan sebelumnya.

Walaupun demikian, pada periode setelah tahun 1950an data pendukung model keseimbangan umum terapan (seperti I-O dan SAM) dapat dimanfaatkan

sebagai pendukung model keseimbangan umum teoritis (Hulu,1995). (Susilo, 1999).

Penelitian ini menggunakan *grand theory* yaitu teori walras dalam halnya teori keseimbangan umum (*output-input*). Laporan keuangan merupakan *output* atau hasil dari serangkaian proses pencatatan yang diawali dengan *input* yaitu transaksi. Laporan Keuangan adalah *output* dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya, teori *input output* berhubungan dengan hasil penelitian ini yaitu hasil uji hipotesis berpengaruh atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen

2. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para *stakeholder*. Istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Standford Research Institute* (RSI) ditahun 1963 (Freeman, 1984). Tandiontong (2016:1) menyatakan Freeman (1984) mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Biset (1998) secara singkat mendefinisikan *stakeholder* merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian dalam permasalahan. *Stakeholder* ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi

kekuatan dan kepentingan relatif *stakeholder* terhadap isu, Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.

Selanjutnya, Deegan (2004) menyatakan berdasarkan teori *stakeholders*, manajemen organisasi diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada *stakeholder*. Teori ini menyatakan seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka (sebagai contoh, melalui polusi, sponsorship, inisiatif pengamanan, dll), bahkan ketika mereka tidak dapat secara langsung memainkan peran konstruktif dalam kelangsungan hidup organisasi.

Stakeholder merupakan pihak yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan sehingga *stakeholder* dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan perusahaan. *Stakeholder* pada dasarnya dapat mempengaruhi pemakaian berbagai sumber ekonomi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan sehingga pada umumnya teori *stakeholder* umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan pengaruh *stakeholder* tersebut. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghozali, 2007).

Menurut Mardikanto (2014), premis dasar dari teori *stakeholder* adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.

Tandiontong (2016:3) menyatakan pemangku kepentingan adalah terjemahan dari kata *stakeholder* dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Misalnya, bilamana isu auditing, maka *stakeholder* dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam isu audit, seperti *principal* (pemilik saham), manajemen (*agent*), regulator (pemerintah), bank, perusahaan pemerintah, dan sebagainya. *Stakeholder* dalam hal ini dapat juga dinamakan pemangku kepentingan. Pandangan-pandangan diatas menunjukkan bahwa pengenalan *stakeholders* tidak sekedar menjawab pertanyaan siapa *stakeholder* suatu isu tapi juga sifat hubungan *stakeholder* dengan isu, sikap, pandangan, dan pengaruh *stakeholder* itu. Aspek-aspek itu sangat penting dianalisis untuk mengenal *stakeholder*.

3. Teori Signalling (*Signalling Theory*)

Teori asimetri informasi (*asymmetric information theory*), atau dikenal juga dengan teori signal (*signalling theory*) dikembangkan pada ilmu ekonomi

dan keuangan yang dilandasi pemikiran bahwa orang dalam perusahaan (*insider*) pada umumnya memiliki informasi lebih baik tentang perusahaan dibandingkan dengan investor luar (*outsider*). Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. Dikutip dari Brigham dan Houston (2006) teori sinyal dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk informasi yakni informasi simetris (*symmetric information*) dan informasi asimetris (*asymmetric information*). Informasi simetri (*symmetric information*) dapat terjadi saat investor memiliki informasi yang sama mengenai prospek sebuah perusahaan seperti para manajernya. Sedangkan informasi asimetri (*asymmetric information*) terjadi saat para manajer memiliki informasi yang lebih baik daripada investor pihak luar. Informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain.

Rura (2010: 384) menyatakan *signalling theory* yang diperkenalkan oleh Akerlof (1970), yaitu informasi mempunyai nilai, dan di dalam suatu transaksi para pihak yang terlibat memiliki tingkat informasi yang berbeda. Issu utama artikel Akerlof berkaitan dengan kualitas dan ketidakpastian.

Wiyono dan Kusuma (2017:27) menyatakan manajer tidak begitu mengetahui tentang harga pasar saham dan tingkat suku bunga (*interest rates*) yang akan berlaku di masa mendatang. Tetapi mereka tentu akan memahami

dan mengetahui tentang prospek perusahaan. Ketika hanya manager yang mengetahui prospek perusahaan sementara investor dan analis tidak mengetahuinya, maka dalam situasi ini telah terjadi asimetri informasi. Manager mengetahui, adanya *overvalued* atau *undervalued* atas saham dan obligasi perusahaan tergantung pada informasi itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Munculnya masalah asimetri informasi ini menjadikan investor memberikan penilaian yang lebih rendah (*undervalued*) terhadap saham perusahaan, sehingga muncul kecenderungan *polling equilibrium* yaitu dimana kondisi dimana perusahaan yang kualitasnya bagus dan perusahaan yang berkualitas jelek dijadikan satu dalam “*pool*” penilaian yang sama. Oleh karena itu, perusahaan yang berkualitas kinerja bagus akan berusaha memberikan insentif sebagai signal kepada investor, yang sulit atau tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain yang kinerjanya tidak bagus, seperti membayar dividen tunai yang relative besar kepada investor. Keputusan semacam ini tentu akan sulit ditiru oleh perusahaan lain yang berkinerja buruk. Akhirnya terjadi pemikiran yang rasional dari investor sehingga dapat membedakan mana perusahaan yang bagus dan mana yang tidak bagus, penelitian berbeda ini disebut dengan *separating equilibrium*.

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan atau catatan untuk

keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

4. *Good Corporate Governance*

4.1. Definisi *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2012), perusahaan yang banyak bergantung pada modal eksternal yang mereka pakai untuk kegiatan operasional, melakukan investasi, dan menciptakan pertumbuhan perusahaannya perlu memastikan kepada pihak penyandang dana eksternal bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian tersebut diberikan oleh sistem *good corporate governance*. *Good corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris atau dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Selanjutnya menurut Daniri (2014:5) *Good Corporate Governance* merupakan struktur dan proses (peraturan, sistem, dan prosedur) untuk memastikan prinsip berimigrasi menjadi kultur mengarahkan dan

mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan kepentingan *stakeholders* yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Organisasi for Economic Co-Operation and development (OECD) menyatakan *Good Corporate Governance* adalah struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (Sedarmayanti, 2007:53)

Terdapat banyak definisi mengenai *corporate governance* (tata kelola perusahaan). Menurut Turnbull Report di Inggris 9 April 1998 yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Lembaga *Corporate Governance* di Malaysia yaitu *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCG) mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Menurut Efendi (2016) Komite Cadbury menyatakan bahwa *corporate governance* sebagai:

“*Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, Direktur, pemegang saham dan sebagainya”.

Selanjutnya, *Corporate Governance* menurut Sutedi (2011:1) adalah :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Effendi (2016) menyatakan OECD mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai:

“ Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham dan pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien”

Selanjutnya, menurut Tunggal (2013:149)

“*Corporate Governance* adalah system dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan

perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.”

Definisi tata kelola perusahaan memiliki cakupan yang lebih luas yaitu menekankan pada pendekatan yang berorientasi pada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Solomon dan Brennan (2008:12) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai berikut :

“... *the system of checks and balances, both internal and external to companies, which ensures that companies discharge their accountability to all their stakeholders and act in a socially responsible way in all areas of their business activity*” (Solomon, 2007, p. 14). (tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem cek dan *balance*, baik secara internal maupun eksternal terhadap perusahaan, yang memastikan bahwa perusahaan menjalankan akuntabilitas terhadap semua pemangku kepentingan dan melakukan tanggung jawab sosial pada setiap aktivitas bisnisnya)

Menurut Sulistyanto (2018:134) secara definitif *good corporate governance* diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholdernya. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. Pemegang saham mempunyai hak untuk memperoleh semua informasi secara akurat dan tepat waktu. Artinya, semua pemegang saham tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi yang sama (*fairness*). Tidak ada informasi yang disembunyikan dari pemegang saham tertentu untuk kepentingan pribadi pihak-pihak lain (*transparency*)

Dari pengertian *good corporate governance* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *good corporate governance* dalam perspektif sempit diartikan sebagai mekanisme administrasi yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain. *Good corporate governance* merupakan hal yang sangat penting karena *good corporate governance* adalah aturan atau ketentuan tentang bagaimana seharusnya pemilik modal, direksi dan dewan komisaris bertindak dalam menjalankan perusahaan demi kesinambungan perusahaan tersebut dan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*)

4.2. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Tujuan pelaksanaan *corporate governance* menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Sedarmayanti (2012) menyatakan penerapan *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan bagi diri sendiri, dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor, lemahnya praktik *corporate governance* merupakan salah satu faktor yang memperpanjang krisis ekonomi di Indonesia. Menurut Sedarmayanti (2012:61), Pelaksanaan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* bertujuan untuk :

1. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan responsibilitas agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik yang secara nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim yang mendukung investasi.
2. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan.

Sedangkan menurut Hery (2010) ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* yaitu :

1. *Good Corporate Governance* secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional
2. *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya

yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.

3. *Good Corporate Governance* dapat membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi

Manfaat dan *Good Corporate Governance* yang optimal tidak sama dan satu perusahaan ke perusahaan lainnya bahkan pada perusahaan publik sekalipun, dikarenakan perbedaan faktor-faktor intern perusahaan, termasuk riwayat hidup perusahaan. Jenis usaha bisnis, jenis risiko bisnis, struktur permodalan dan manajemennya

4.3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2012:10) kesadaran pentingnya pengelolaan perusahaan yang baik itu sangat diharapkan terdapat di dalam setiap perusahaan. Kesadaran ini diperlukan agar informasi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dipercaya kebenarannya. Adapun beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *corporate governance*, yaitu sebagai berikut :

1. Transparasi

Perusahaan harus memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders*. Perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas,

dan frekuensi dari pelaporan keuangan, ini semua untuk mengurangi kegiatan curang seperti manipulasi laporan (*creative accounting*) atau manajemen laba (*earnings management*), pengakuan pajak yang salah, dan penerapan dari prinsip prinsip pelaporan yang cacat.

2. Dapat dipertanggungjawabkan (*Accountability*)

Setiap hal yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan perusahaan itu harus dilaporkan atau harus diketahui oleh *stakeholders*, itu semua adalah bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan kepada *stakeholders*. Terlebih, bila dalam perusahaan tersebut terjadi kesalahan seperti integritas manajemen yang rendah, etika bisnis yang buruk, dan aturan kekuatan daripada aturan hukum.

3. Kejujuran (*Fairness*)

Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. Sehingga, perusahaan ditekankan harus memiliki kejujuran terhadap *stakeholders*.

4. *Sustainability*

Ketika perusahaan dapat berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan, dalam jangka panjang harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi

warga *corporate* yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi *stakeholder*

Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dikemukakan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002 mengenai *good corporate governance*, yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai efektif.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4. Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Dalam penerapan *good corporate governance* pada perusahaan dibutuhkan unsur – unsur yang mendukung. Adapun menurut Sutedi (2011), unsur-unsur dalam GCG yaitu :

1. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah : (a) Pemegang saham; (b) Direksi; (c) Dewan komisaris; (d) Manajer; (e) Karyawan; (f) Sistem remunerasi berdasar kinerja; (g) Komite audit.

Unsur - unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi : (a) Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*); (b) Transparansi; (c) Akuntabilitas; (d) Kesetaraan; (e) Aturan dari *code of conduct*;

2. *Corporate Governance* – External Perusahaan

Unsur - unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah : (a) Kecukupan undang - undang dan perangkat hukum; (b) Investor; (c) Institusi penyedia informasi; (d) Akuntan publik; (e) Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan; (f) Pemberi pinjaman; (g) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi: (a) Aturan dari *code of conduct*; (b) Kesetaraan; (c) Akuntabilitas; (d) Jaminan hukum.

Perilaku partisipasi pelaku *Corporate Governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas *Corporate Governance*.

4.5. Dimensi Pengukuran Mekanisme *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2012), mekanisme *good corporate governance* merupakan mekanisme dari eksternal dan internal perusahaan diantaranya

a. Mekanisme eksternal

Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

b. Mekanisme internal

Mekanisme internal dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Berikut penjelasan definisi dan pengukuran dari mekanisme internal *corporate governance*

1. Komisaris Independen

Komisaris independen menurut Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang – undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah

“Komisaris dari pihak luar”. Pasal 120 ayat (2) UUPT juga mengatur bahwa komisaris independen diangkat dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Selanjutnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04 Tahun 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 21 ayat (2), diatur bahwa Komisaris Independen harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dan Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Menurut pasal 120 ayat (1) UUPT, keberadaan Komisaris Independen bergantung pada Anggaran Dasar Perseroan. “Anggaran dana Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.” Apabila Anggaran Dasar perseroan mengatur bahwa dalam Dewan Komisaris terdapat Komisaris Independen, maka keberadaan Komisaris Independen tersebut menjadi wajib. Akan tetapi hal diatas tidak berlaku bagi perusahaan yang tercatat dalam bursa saham Indonesia. Untuk perusahaan tersebut, keberadaan Komisaris Independen ini diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04 Tahun 2014, dalam pasal 20 ayat (2), bahwa dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Dan dalam pasal 20 ayat 3 (tiga), dijelaskan bahwa jumlah wajib kepemilikan Komisaris Independen sekurang kurangnya adalah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110) adalah sebagai berikut :

“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat

kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Namun, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing - masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara

Selanjutnya, keberadaan komisaris independen adalah proporsi komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris dari suatu perusahaan. Komisaris independen adalah pihak luar yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris lainnya. Berikut rumus untuk pengukurannya :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

Budiarti dan Sulistyawati (2014:164) menyatakan dewan komisaris independen dalam mekanisme *good corporate governance* berperan penting tidak hanya melihat kepentingan pemilik tetapi juga kepentingan perusahaan secara umum. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *outside director* akan lebih efektif dalam memonitor manajemen selain itu *outsider* juga lebih banyak memberikan expert knowledge dan nilai tambah bagi perusahaan. Hal tersebut didukung oleh Boone *et al.*,(2007) serta Hermalin dan Weisbach (1988) yang menyatakan bahwa *outside director* selain lebih efektif dalam memonitor manajemen juga merupakan sarana untuk mendisiplinkan para manajer yang melakukan perilaku oportunistik terhadap kepentingannya sendiri dapat dikurangi.

2. Kepemilikan manajerial

Pengertian kepemilikan manajerial Menurut Tjeleni (2013), sebagai berikut :“Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham”.

Subagyo, Masruroh, dan Bastian (2018:46) menyatakan struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham, Faisal (2005) dalam Sabrina (2010). Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempegaruhi kinerja perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Berikut rumus pengukuran dari kepemilikan manajerial :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki manajerial}}{\sum \text{Saham yang beredar}}$$

Selain menggunakan pengukuran persentase kepemilikan manajerial, kepemilikan manajerial dapat diukur menggunakan variabel dummy, Variabel kepemilikan manajerial menggunakan variabel dummy untuk menunjukkan ada tidaknya kepemilikan manajerial. Dummy digunakan dengan ketentuan $D=1$ untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial dan $D=0$ untuk perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial (Dewi, 2008). Mahadwartha (2002) dan Hanafi (2003) dalam Dewi (2008) mengemukakan bahwa kecenderungan data di Indonesia bersifat binominal (ada atau tidaknya), untuk itu digunakan variabel dummy dalam pengukurannya

Jensen dan Meckling (1976) menemukan kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Penelitian mereka menemukan bahwa kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Dalam kepemilikan saham yang rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat (Shleifer dan Vishny 1986). (Herawati, 2008)

Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris dimasukkan dalam kepemilikan manajerial (*manajerial ownership*). Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap

kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai presentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan. Selanjutnya, kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif menyelaraskan kepentingan dengan *principle* dan manajer yang mempunyai kepemilikan saham akan cenderung bertindak sesuai kepentingan pemegang saham karena terdapat kesamaan kepentingan antara keduanya serta rasa memiliki perusahaan

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien,*et.al*, 2006) dalam Winanda (2009). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Subagyo, Masruroh, dan Bastian (2018:47)

Hery (2014:172) menyatakan kepemilikan institusional menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusional dalam perusahaan. kepemilikan

institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pension, dan asset management

Pemegang saham institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi, semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham atau *stakeholder*. Cornett *et al.*, 2006, menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan investor institusional dapat membatasi perilaku manajer. Pengukuran penelitian ini mengikuti rumus pengukuran oleh Yasmien dan Hermawati (2015), yaitu :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\sum \text{Saham yang beredar}}$$

4. Komite Audit

Definisi Komite Audit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Menurut Subramanyam (2017:78), pengawasan penting lainnya atas laporan keuangan adalah mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Laporan keuangan harus disetujui oleh dewan direksi perusahaan. banyak perusahaan menunjuk komite audit – subkomite dari dewan direksi-untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Komite audit ditunjuk oleh dewan direksi dan diwakili oleh manager dan pihak luar. Komite audit sering diberi kepercayaan dengan kekuasaan yang luas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan berbagai aspek dari proses pelaporan. Hal ini meliputi pengawasan metode akuntansi, prosedur pengendalian internal, dan audit internal.

Banyak pihak yang percaya bahwa komite audit yang independen dan kuat merupakan fitur tata kelola perusahaan penting yang berkontribusi besar pada kualitas pelaporan keuangan. Menurut Hamdani (2016:92), komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa : (a). Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; (b). Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik; (c). Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; (d). Tindaklanjuti temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen

Komite Audit memproses calon audit eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas. Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya

tercatat di Bursa Efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk dan jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya yang terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Pengertian komite audit menurut Arens *et al.* (2010) adalah sebagai berikut:

“...is a selected number of members of a company’s board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes many as seven directors who are not a part of company management.”

Pengertian di atas menjelaskan bahwa komite audit adalah sejumlah orang yang ditunjuk oleh perusahaan dan bertujuan untuk menjadi penengah apabila terjadi perselisihan antara auditor dan manajemen perusahaan. Umumnya, komite audit terdiri dari tiga hingga tujuh orang yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan.

Berikut beberapa metode pengukuran dari Komite Audit :

Menurut Robert Jao (2011), komite audit diukur dengan menggunakan:

Komite Audit = Jumlah anggota rapat dalam satu tahun

Sedangkan menurut Pujiningsih (2011), komite audit dapat diukur dengan menggunakan:

Komite Audit = Jumlah anggota komite audit di Perusahaan

Komite audit dengan jumlah anggota yang cukup akan mendorong fungsi pengawasan yang dilakukan. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 pasal 4 menyatakan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Sihombing dan Laksito (2017:2) menyatakan komite audit dengan jumlah anggota yang cukup akan mendorong fungsi pengawasan yang dilakukan. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota, baik yang berasal dari komisaris independen maupun pihak luar perusahaan. Vafeas (2005) menemukan komite audit dengan jumlah anggota yang lebih banyak dapat mengurangi kemungkinan komite audit terpengaruh dengan manajer perusahaan. Namun, Lipton dan Lorsch (1992) menemukan bahwa komite audit dengan jumlah anggota yang banyak mungkin tidak akan menghadapi permasalahan yang terlalu besar sehingga dapat mengurangi kewaspadaan akan fungsi pengawasan yang dilakukan

Rumus yang telah disebutkan sebelumnya untuk menjelaskan jumlah komite audit yang ada di perusahaan. Menurut Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa Komite audit minimal terdiri dari 3 orang, dengan rincian minimal 1 orang komisaris independen yang menempati posisi ketua komite audit dan minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten. Karena dengan semakin besar ukuran

komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite terhadap pihak manajemen.

Sulistyanto (2018: 141) menyatakan untuk membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan, yaitu komite audit (*audit committee*) dan komisaris independen (*board of directors*). Komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit. Sedangkan komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. meski setiap pihak mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda namun pada prinsipnya kedua pihak ini mempunyai tujuan yang serupa, yaitu mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab.

5. Karakteristik Perusahaan

5.1. Definisi Karakteristik Perusahaan

Shehu (2012) mengartikan karakteristik perusahaan (*firm characteristics*) sebagai variabel – variabel insentif yang secara relative melekat pada setiap tingkat perusahaan selama waktu tertentu (*,the firm characteristics are those*

incentive variables that relatively sticky at firms level across time). Yadiati dan Mubarak (2017:126)

5.2. Katagori Karakteristik Perusahaan dan Pengukurannya

Yadiati dan Mubarak (2017:126) menyatakan Lang dan Lundholm (1993) membagi karakteristik perusahaan menjadi tiga katagori, yaitu variabel kinerja (*performance variables*), variabel struktural (*structural variables*), dan variabel penawaran (*offer variables*). Belkaoui (2001) membagi karakteristik perusahaan menjadi tiga katagori, yaitu variabel pertumbuhan (*growth variables*), variabel struktural (*structural variables*), dan variabel multinasional (*multinationality variables*). Wallance *et al.* (1994), Naser (1998), Camfferman, dan Cooke (2002), Oliveira *et al.* (1994), dan Al Saeed (2006) membagi karakteristik perusahaan sesuai dengan pembagian Lang dan Lundholm (1993) tetapi mengganti istilah variabel penawaran dengan variabel pasar (*market variables*). Adapaun Naser *et al.*, (2002) menambahkan satu lagi katagori variabel karakteristik perusahaan, yaitu variabel kepemilikan (*ownership variables*). Berikut penjelasan dari karakteristik ukuran perusahaan

1. Variable penawaran (*the “offer” variable*) berkaitan dengan surat berharga, baik surat berharga ekuitas ataupun surat berharga utang. Variabel ini menjelaskan sejauh mana kegiatan penerbitan surat berharga yang dilakukan perusahaan (Lang dan Lundholm, 1993).

2. Variabel kinerja berkaitan dengan periode waktu tertentu atau dapat berubah dari waktu ke waktu dan mewakili suatu informasi yang menarik untuk diungkapkan dan sekaligus menjadi pertimbangan bagi pengguna laporan keuangan (Lang dan Lundholm, 1993; Wallace *et al.*, 1994; Naser, 1998; Al Saeed, 2006; Naser *et al.*, 2002). Beberapa variabel yang tergolong sebagai variabel kinerja antara lain rasio likuiditas seperti *current ratio*, *earning return* seperti ROE dan *profit margin*.
3. Variabel struktural (*structural variable*) merupakan variabel karakteristik perusahaan yang sudah dikenal luas dan cenderung relatif stabil untuk beberapa waktu lamanya (Lang dan Lundholm, 1993 dan Wallace *et al.*, 1994). Variabel struktural meliputi ukuran perusahaan (*firm size*), rasio utang (*debt ratio*) atau *leverage level*, konsentrasi kepemilikan (*ownership concentration*) atau *ownership dispersion* (Al Saeed, 2006).
4. Adapun variabel pasar (*market-related variable*), variabel ini bersifat kualitatif baik dalam karakter maupun kategori. Variabel ini relatif stabil untuk beberapa waktu dan sebagiannya dapat dikontrol (Wallace *et al.*, 1994). Variabel pasar meliputi variabel tipe industry (Al Saeed, 2006; Naser, 1998; Wallace *et al.*, 1994), ukuran perusahaan audit (Al Saeed, 2006; Naser, 1998; Wallace *et al.*, 1994); Camfferman dan Cooke, 2002), kapitalisasi market (Naser, 1998) dan listing status (Wallace *et al.*, 1994).

Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada perusahaan, menandai sebuah perusahaan dan membedakannya dengan perusahaan lain. Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda satu entitas dengan entitas lainnya.

Selanjutnya, karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan, karakteristik perusahaan merupakan prediktor kualitas pengungkapan (Lang dan Lundholm, 1993 dalam Rosmasita, 2007). Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda antara entitas yang satu dengan yang lain. Karakteristik perusahaan dapat berupa ukuran perusahaan (*size*), leverage, basis perusahaan, jenis industri, serta profil dan karakteristik lainnya (Marwata, 2001).

6. Kualitas Audit

6.1. Definisi Kualitas Audit

Istilah "kualitas audit" mempunyai arti yang berbeda - beda bagi setiap orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan audite. Menurut Arens *et al.* (2011:105) kualitas audit adalah suatu proses audit untuk mendeteksi dan melaporkan material *misstatement* dalam laporan keuangan. Aspek pendeteksian mencerminkan kemampuan auditor menunjukkan etika dan integritas audit, terutama independensi

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik, peran auditor independen menjadi signifikan. Sebagai sebuah profesi, auditor bertugas untuk memberikan jaminan apakah laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen untuk *stakeholders* telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kualitas audit merupakan konsep yang menunjukkan bahwa auditor dapat melaksanakan tugas secara profesional berdasarkan etika profesi, kompetensi, dan independensi. Kualitas audit sebagai profitabilitas gabungan nilai pasar bahwa auditor menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, dan melaporkan pelanggaran (DeAngelo, 1981).

Para pengguna tentu berekspektasi bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dapat digunakan menjadi dasar pengambilan keputusan. Dua konsep penting dalam mewujudkan kualitas auditor, yaitu kompetensi dan independensi. Kompetensi menunjukkan kemampuan profesionalisme seorang auditor, artinya auditor harus memiliki kemampuan yang cukup dalam bidangnya. Sedangkan independensi merupakan sikap mental yang harus dimiliki auditor dalam menjalankan profesinya (Juniadi dan Nurdiono, 2016)

Definisi kualitas audit menurut Lee *et al.* (1999) kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak melakukan laporan audit dengan wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Kualitas audit ditentukan oleh kemampuan audit untuk

mengurangi *noise* dan bias dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi (Wallace, 1980 dalam Watkins et al., 2004). Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut (DeAngelo, 1981b).

DeAngelo (1981:186) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut :

“the market-assessed joint probability that given auditor will both (a) discover a breach in the client’s accounting system, and (b) report the breach”. (Kemungkinan kombinasi pengujian oleh pasar dimana auditor mampu menemukan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien).

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan fungsi dari kemampuan auditor untuk mendeteksi salah saji material (kemampuan teknis) dan melaporkan kesalahan (independensi auditor) (Chandegani, 2011). Kemampuan auditor menemukan pelanggaran akan tergantung pada kemampuan menggunakan teknologi, prosedur audit yang digunakan, luasnya sampel audit, dan lain – lain. Adapun kemampuan untuk melaporkan pelanggaran akan tergantung pada apakah auditor memiliki sikap independen terhadap klien.

Selanjutnya, Coram *et al.* (2008) menyatakan kualitas audit adalah seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya *unintentional/intentional error* dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini auditnya. Kualitas audit tergantung kemampuan

teknikal auditor terpresentasi dalam pengalaman dan pendidikan profesi, dan independensi auditor dalam menjaga sikap mentalnya

Berdasarkan definisi sebelumnya, dapat dijelaskan kembali bahwa kualitas audit sesungguhnya sulit untuk diobservasi pihak luar perusahaan, maka riset sebelumnya menggunakan berbagai ukuran yang adapat diobservasi sebagai proksi kualitas audit sesungguhnya. Proksi yang digunakan mencakup *akrual diskresioner*, biaya pendanaan utang, penyajian kembali laporan keuangan, *ligitasi* auditor, kecenderungan pemberian opini *going concern*, dan *fraud*

6.2. Pengukuran Kualitas Audit

Menurut Tandiontong (2016:168) menyatakan para akademisi pada umumnya sepakat bahwa audit yang berkualitas harus dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen (misalnya, DeAngelo, 1981 b; Watkins *et al.*, (2004) menunjukkan bahwa keduanya kompetensi dan independensi, adalah dimensi utama dari kualitas audit.

Perbedaan DeAngelo (1981) dengan Watkins *et al.* (2004) adalah pada sisi pandang. DeAngelo (1981) memandang dari sisi pasar sedangkan Watkins *et al.* (2004) menginginkan bahwa kualitas itu harus dari sisi aktual kompetensi dan independensi. Watkins *et al.* (2004) menyebut kompetensi dan independensi aktual ini sebagai kekuatan pemantauan (*monitoring strength*). Beberapa penelitian pernah menekankan kekuatan pemantauan ini, alih-alih reputasi seperti DeAngelo (1981b). Diantaranya adalah

Davidson dan Neu (1993) dan Lee *et al.* (1999). Namun, mereka kembali kepada ukuran kantor publik sebagai ukuran kekuatan pemantauan.

Berikut penjelasan tentang independensi dan kompetensi auditor

1. Independensi

Wilcox (1952) di dalam Mautz dan Sharaf (1961) menekankan bahwa independensi adalah standar pengauditan yang esensial untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Ia menekankan bahwa jika akuntan tidak bersikap independen, maka opini yang diberikannya tidak akan memberi tambahan nilai apapun. Kewajiban ini harus dijalankan oleh akuntan walau hal tersebut harus bertentangan dengan keinginan pihak yang menyewa mereka.

Mautz dan Sharaf (1961) berpendapat ada dua aspek dari independensi, yaitu 1) independensi real dari seorang praktisi dalam melaksanakan pekerjaannya dan 2) independensi dalam penampilan dari auditor sebagai satu kelompok profesional. Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi individual untuk mempertahankan perilaku yang tepat / pantas didalam perencanaan program auditnya, mempertahankan kinerjanya ketika melakukan pemverifikasian, dan menyiapkan laporan. Sebaliknya, independensi profesi berhubungan dengan apa yang dipandang public tentang auditor.

2. Kompetensi

Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya

Selanjutnya Tandiontong (2016:172) menyatakan bahwa pengauditan sendiri adalah sebuah penyerahan jasa. Dari pekerjaan itu yang terjadi adalah penyerahan barang nonfisik atau tidak berwujud dan hanya laporan audit dan fee audit yang memiliki wujud. Laporan audit tersebut juga dijadikan bukti tentang kecakapan, upaya, dan waktu yang didedikasi untuk menghasilkan laporan dan menjustifikasi fee. Implisit dari fakta ini adalah bahwa tidak ada bukti berwujud bagi pemegang saham dan konstituen eksternal lain tentang aktivitas audit yang dilaksanakan hingga laporan audit selesai. Bahkan laporan audit sendiri tidak bisa menggambarkan apakah aktivitas audit telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, para pengguna laporan sangat memerlukan seseorang yang memiliki keahlian profesional yang bisa dijadikan pegangan yang memiliki kredibilitas karena kompetensinya. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka auditor tidak

aka bisa memenuhi apa yang diekspektasi oleh pengguna laporan audit. (Lee, 1993: 82, 118).

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pengukuran kualitas audit dengan penilaian variabel dummy, dimana jika kantor akuntan publik adalah kantor akuntan yang berafiliasi dengan Big 4 yaitu Pricewaterhouse Cooper (PWC), Deloitte Touche Tomatsu Limited, Ernst & Young (EY) dan KPMG, akan diberikan nilai 1 dan 0 untuk non Big 4. Becker et al. (1988) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa kualitas audit yang rendah mempunyai korelasi dengan fleksibilitas akuntansi atau praktik manajemen laba yang lebih tinggi. Auditor diharapkan dapat membatasi dan mengurangi praktik manajemen laba serta membantu untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pengguna laporan keuangan.

Pengukuran kualitas audit menggunakan ukuran kantor akuntan publik sesuai dengan pernyataan De Angelo (1981). De Angelo (1981) mengemukakan ukuran kantor akuntan adalah wakil untuk kualitas audit (independensi auditor) karena tidak ada satu klien yang penting untuk satu KAP yang berukuran besar, dan auditor mempunyai reputasi yang lebih besar untuk kehilangan (keseluruhan kelompok mereka) jika mereka salah melaporkan. Defond dan Jiambalvo (1991) juga mengatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik (KAP) dapat digunakan untuk menilai kualitas audit. Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi. Tandiontong (2016:84).

7. Asimetri Informasi

7.1. Definisi Asimetri Informasi

Huda dan Naution (2014:136) menyatakan bahwa Irfan (2002), mendefinisikan asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai pihak pemberi informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* yang pada umumnya sebagai pengguna informasi. Scott (1997) menyatakan bahwa terdapat dua tipe asimetri informasi yaitu : (a). *Advers solution* adalah para manager serta orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan investor pihak luar; (b). *Moral hazard* adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang manager tidak seluruhnya diketahui oleh pengguna saham ataupun pemberi pinjaman

Asimetri informasi terjadi ketika adanya kondisi dimana manager memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada pihak manajemen untuk memanipulasi informasi keuangan yang diketahuinya sebagai usaha dalam memaksimalkan kemakmuran sendiri tanpa diketahui para investor

Selanjutnya, Pengertian asimetri informasi menurut Suwarjono (2014:584) : “Asimetri informasi adalah dimana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor/kreditor”.

Menurut Mamduh M. Hanafi (2014:217), mengatakan bahwa :

“Konsep signaling dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.”

Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal sebagai pemilik. Sehingga dengan adanya asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka meningkatkan utilitasnya. Fleksibilitas manajemen untuk memanajementkan laba dapat dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba

Jensen dan Meckling (1976) menambahkan jika kedua kelompok (agen dan prinsipal) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Prinsipal dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang

tepat bagi agen dan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang.

Yushita (2010:55) menyatakan agen lebih banyak mempunyai informasi karena berhubungan langsung dengan perusahaan. dengan asumsi bahwa masing-masing individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya, maka dengan adanya asimetri informasi akan mendorong agen untuk menyembunyikan informasi yang tidak dimiliki principal. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun karena adanya kondisi yang asimetri, maka agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba (*earnings management*)

7.2. Jenis Asimetri Informasi

Scott (2009) membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul daripada pihak lainnya. Menurut Scott (2009:13-15), dua jenis asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse Selection*

“Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa adverse selection adalah jenis informasi yang diperoleh dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial memiliki keunggulan informasi melalui pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.

2. *Moral Hazard*

“Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot”.

Berdasarkan pernyataan diatas, *moral hazard* adalah jenis informasi dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial, dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan transaksi tetapi pihak lain tidak bisa. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

7.3. Pengukuran Asimetri Informasi

Menurut Calrks dan Shasri (2000) dalam Wasilah (2005), estimasi asimetri informasi dapat dilakukan berdasarkan tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Berdasarkan *analyst forecast*

Proksi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah keakuratan analisis dalam melakukan prediksi atas *earning per share* (EPS) dan diprediksi para ahli sebagai ukuran asimetri informasi. Masalah yang sering timbul dari perhitungan ini adalah para analis seringkali bersikap *over-reacting* terhadap informasi positif dan bersikap *under reacting* terhadap informasi negatif. Selain itu, penggunaan *forecast error* sebagai cara menghitung asimetri informasi tidak selalu berhubungan dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan melainkan mungkin berhubungan dengan fluktuasi dari *earning* dan bukan disebabkan oleh asimetri informasi yang lebih tinggi. Namun Chung *et al.* (1995) dalam Wasilah (2005), berpendapat bahwa ada hubungan yang positif antara pendapat analisis dengan selisih harga *bid ask*.

2. Berdasarkan kesempatan berinvestasi

Smith and Watts (1992) dalam Wasilah (2005) berpendapat perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi mempunyai kemampuan lebih baik untuk memprediksi arus kas pada periode mendatang. Prediksi tersebut berdasarkan aset perusahaan. Beberapa proksi yang banyak digunakan adalah rasio *market value to book value* dari ekuitas, *market to book value* dari aset, *price earnings ratio*. Alasan menggunakan rasio tersebut adalah sebagai berikut: (a). Rasio *market to book value* dari ekuitas dan assets, selain mencerminkan kinerja perusahaan, juga mencerminkan

potensi pertumbuhan perusahaan dengan aset yang dimilikinya. (b). *Price earning ratio* mencerminkan risiko dari pertumbuhan earning yang dihadapi perusahaan.

3. Berdasarkan teori market *microstructure*

Bagian teori market *microstructure* yang memperoleh perhatian luas adalah bagaimana harga dan volume perdagangan dapat dibentuk, dan faktor yang mampu melihat hal tersebut adalah bid ask spread, yaitu selisih harga beli tertinggi dengan harga jual terendah dari saham yang diperjualbelikan

Menurut Jogiyanto (2010:417), indikator yang digunakan untuk mengukur variabel asimetri informasi dapat dilihat dari selisih harga beli terendah yang diajukan oleh pembeli dan harga jual tertinggi yang diminta oleh penjual.

Teori *Bid-Ask spread* yaitu jika seorang investor ingin membeli atau menjual suatu saham atau sekuritas lain di pasar modal, dia biasanya melakukan transaksi melalui *broker/dealer* yang memiliki spesialisasi dalam suatu sekuritas. *Broker/dealer* inilah yang siap untuk menjual pada investor untuk harga *ask* jika investor ingin membeli suatu sekuritas. Jika investor sudah mempunyai suatu sekuritas dan ingin menjualnya, maka *broker/dealer* ini yang akan membeli sekuritas dengan harga *bid*. Perbedaan antara harga *bid* dan harga *ask* ini adalah *spread*. Jadi *bid-ask spread* merupakan selisih harga beli tertinggi bagi *broker/dealer* bersedia untuk membeli suatu saham dan harga jual dimana *broker/dealer* bersedia untuk menjual saham tersebut (Restuwulan, 2013)

Pengukuran terhadap asimetri informasi seringkali diproksikan dengan *bid-ask spread* disebabkan asimetri informasi tidak dapat diobservasi secara langsung. Harga *bid* merupakan harga permintaan pasar. Harga ini akan digunakan ketika melakukan transaksi jual. Harga *ask* adalah penawaran pasar. Harga ini akan digunakan ketika melakukan transaksi beli. Selisih antara harga *bid* dan *ask* ini disebut sebagai *spread* (Salim, 2010: 72). *Bid-ask spread* merupakan fungsi dari tiga komponen biaya yang berasal dari (1) pemilikan saham, (2) pemrosesan pesanan, (3) asimetri informasi. Biaya asimetri informasi lahir karena adanya dua pihak *trader* yang tidak sama dalam memiliki dan mengakses informasi. Pihak pertama adalah *informed trader* yang memiliki informasi *superior* dan pihak lain yaitu *uninformed trader* yang tidak memiliki informasi.

Dimana asimetri informasi dapat dilihat dari harga saat *ask* dengan harga *bid* saham perusahaan atau selisih harga jual dengan harga beli saham perusahaan selama satu tahun. Berikut rumus mengukur asimetri informasi dengan menggunakan relative bid ask spread. Komalasari (2001:72):

$$\text{SPREAD} = \{(Ask_{it} - Bid_{it}) / (Ask_{it} + Bid_{it}) / 2\} \times 100$$

Keterangan:

SPREAD = Selisih harga saat *ask* dengan harga *bid* perusahaan yang terjadi pada t

Ask_{it} = Harga *ask* tertinggi saham perusahaan i yang terjadi pada hari t

Bid_{it} = Harga *bid* terendah saham perusahaan i yang terjadi pada hari t

Komalasari (2000:194) menyatakan informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan asimetri informasi. Asimetri informasi

timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Ketika timbul asimetri informasi, keputusan ungkapan yang dibuat oleh manajer dapat mempengaruhi harga saham sebab asimetri informasi antara investor yang lebih terinformasi dan investor kurang terinformasi menimbulkan biaya transaksi dan mengurangi likuiditas yang diharapkan dalam pasar untuk saham perusahaan.

8. Kualitas Pelaporan Keuangan

8.1. Definisi Kualitas Pelaporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Paragraf 35-40 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Menurut Pura (2013:11), karakteristik merupakan ciri khas yang memberikan informasi laporan keuangan berguna bagi pemakai. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Selanjutnya menurut Astuti (2012) agar informasi dalam laporan keuangan bermanfaat bagi penggunanya, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif. FASB (1980) dalam SFAC No. 2 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberikan kriteria dasar dalam

memilih : (a). alternatif metode akuntansi dan pelaporan keuangan; (b). persyaratan perlengkapan (*disclosure*). Kriteria tersebut digunakan untuk menunjukkan jenis informasi yang relevan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Kangarlouei *et al.* (2011:1165) mengartikan kualitas pelaporan keuangan dengan meringkas penjelasan Jonas dan Blanchet (2000) sebagai berikut :

“Quality of financial reporting is defined as two procedure of user’s need and protection of investors. First procedure is based on user’s need and the quality is determined considering reports usefulness for users. Second procedures emphasizes on protection of investors and the quality is defined as fair and full disclosure for stakeholders

(Kualitas pelaporan keuangan didefinisikan dengan dua prosedur (pendekatan) yaitu pendekatan kebutuhan pengguna dan pendekatan perlindungan investor. Pendekatan pertama didasarkan pada kebutuhan pengguna dan penentuan kualitas pelaporannya didasarkan dengan mempertimbangkan kegunaan laporan tersebut. Pendekatan kedua menekankan pada perlindungan investor dimana dalam pendekatan ini, kualitas pelaporannya didefinisikan sebagai pengungkapan yang wajar dan cukup untuk para pemegang saham). Yadiati dan Mubarok (2017:31)

Menurut Gaynor *et al.*, (2016) dalam Al-Dmour *et al.*, (2018) mendefinisikan kualitas pelaporan keuangan sebagai berikut :

“Financial reporting is a process of reporting financial activities of business on a formal way. It has been considered as an essential resource for any market participant. It also reduces the mystery and the conflict in opinion between all interested users such as managers, investors, regulatory agencies, society and other stakeholders”.

Pelaporan keuangan adalah proses pelaporan kegiatan keuangan bisnis secara formal. Hal tersebut telah dianggap sebagai sumber daya penting untuk setiap pelaku pasar. Hal ini juga untuk mengurangi misteri dan konflik pendapat antara semua pengguna yang tertarik seperti manajer, investor, badan pengatur, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

Berdasarkan definisi berikut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelaporan keuangan merupakan suatu kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan perlindungan bagi pemilik dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan serta pengungkapan secara penuh dan wajar

8.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Pura (2013:11), karakteristik merupakan ciri khas yang memberikan informasi laporan keuangan berguna bagi pemakai. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan itu, ada beberapa standar kualitas yang harus dipenuhi, yaitu :

1) Dapat dipahami

Laporan keuangan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, dengan anggapan bahwa pemakainya telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis

2) Relevan

Maksudnya adalah bahwa informasi keuangan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pemakai dan dapat membantu pemakai dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu serta masa yang akan datang

3) Keandalan atau Reliabilitas

Informasi keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan harus diuji kebenarannya oleh seorang pengukur independen dengan metode pengukuran yang tetap

4) Dapat dibandingkan atau Komparabilitas

Penyajian laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan antarperiode, sehingga dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan

5) Tepat waktu

Laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin, agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan sesuai dengan waktu yang dibutuhkannya informasi tersebut

6) Lengkap

Informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting, sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak menyesatkan pembacanya

Terdapat perbedaan mengenai karakteristik kualitas laporan keuangan dengan pernyataan Hery (2016). Menurut Hery (2016:20), pemilihan metode akuntansi yang

tepat, jumlah dan jenis informasi yang harus diungkapkan, serta format penyajiannya melibatkan penentuan alternative mana yang menyediakan informasi yang paling berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Dalam memilih diantara berbagai alternative akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan yang ada, kerangka kerja konseptual FASB telah mengidentifikasi beberapa karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang berguna. Karakteristik kualitatif tersebut adalah sebagai berikut

a) Dapat dipahami

Pengguna informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat pelaporan keuangan. Informasi akan dianggap berkualitas (berguna) jika informasi tersebut mudah dipahami oleh pemakai atau para pengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan sebagaimana tertuang dalam SFAC No. 1, yaitu diantaranya adalah menyediakan informasi yang berguna bagi para pemakai yang memiliki pemahaman yang memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi serta kredit

b) Relevan

Karakteristik kualitatif dari informasi yang relevan adalah bahwa informasi tersebut memiliki umpan balik (*feedback value*), prediktif (*predictive value*), dan ketepatan waktu (*timeliness*). Informasi yang memiliki umpan balik adalah informasi yang dapat membantu pemakai

mengkoreksi harapan-harapan (ekspektasi) dimasa lampau. Lalu, informasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membantu prediksi atau memperbaiki hasil dimasa mendatang

c) Reliabilitas

Informasi dikatakan dapat diandalkan apabila atau memiliki karakteristik reliabilitas jika informasi tersebut dapat diuji, dapat disajikan dengan tepat, dan netral

d) Komparabilitas

Informasi tentang sebuah perusahaan akan menjadi lebih berguna jika bisa diperbandingkan dengan informasi serupa menyangkut perusahaan lain pada periode waktu yang sama atau dengan informasi yang serupa dari perusahaan yang sama pada periode waktu yang berbeda.

Komparabilitas memungkinkan pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang nyata dalam peristiwa ekonomi perusahaan.

Sesungguhnya hakekat dari komparabilitas adalah bahwa informasi menjadi lebih berguna ketika informasi tersebut dapat dikaitkan dengan sebuah patokan (standar)

e) Konsistensi

Apabila sebuah perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi yang sama untuk kejadian-kejadian yang serupa dari periode ke periode, maka perusahaan tersebut dianggap telah konsisten dalam menerapkan standar akuntansinya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perusahaan tersebut

tidak boleh beralih dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Perusahaan dapat mengubah metode akuntansi dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya yang diperkenankan sepanjang dapat menunjukkan bahwa metode yang baru tersebut lebih baik daripada metode akuntansi yang sebelumnya.

8.3. Pengukuran Kualitas Pelaporan Keuangan

Dalam hal pengujian kualitas pelaporan keuangan, Van Best *et al.*, 2009 menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian sebelumnya, ada berbagai macam model pengujian kualitas pelaporan keuangan. Dari berbagai macam model pengujian tersebut secara umum terbagi dalam empat model yaitu model akrual (*accrual models*), model value relevan (*value relevance models*), model penelitian yang mengkhhususkan pada unsur-unsur tertentu dalam laporan tahunan (*research focusing on specific elements in the annual report*), dan model yang mengoperasionalkan karakteristik kualitatif laporan keuangan (*methods operationalizing the qualitative characteristics*).

1. Model akrual (*accrual models*)

Beuselinck dan Manigart (2007:267) mengartikan akrual sebagai “*accounting elements that distinguish a firm’s cash flow from operations from its reported earnings.*” (Komponen akuntansi yang membedakan arus kas operasi perusahaan dan laba operasi yang dilaporkan). Secara sederhana akrual adalah selisih laba bersih (*net income*) dengan arus kas bersih tahunan (Barth *et al.*, 2007 dan Paglietti, 2009)

Adapun Schipper (1989:92), sebagaimana dikutip juga oleh Alzoubi (2012:247) mendefinisikan manajemen laba sebagai “intervensi (manajemen) dalam proses pelaporan keuangan (yang ditunjukkan) untuk kepentingan eksternal dengan tujuan mendapatkan keuntungan *pribadi* (“*purposeful intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gains*”). Berdasarkan pengertian manajemen laba diatas, dapat dijelaskan bahwa manajemen laba merupakan pengelolaan laba oleh manajemen yang masih dalam batas standar untuk tujuan tertentu. Yadiati dan Mubarak (2017:43)

Laporan keuangan utamanya dibuat berdasarkan basis akrual. Para pendukung basis akrual sangat meyakini bahwa akuntansi akrual lebih unggul dibandingkan akuntansi kas, baik untuk mengukur kinerja dan kondisi keuangan. *Statement of Financial Accounting Concept No. 1* menyatakan bahwa “informasi tentang laba perusahaan berdasarkan akuntansi akrual secara umum memberikan indikasi yang lebih baik mengenai kemampuan saat ini dan keberlanjutan perusahaan untuk menghasilkan arus kas dibandingkan informasi yang terbatas pada aspek keuangan dari penerimaan dan pembayaran kas. Subramanyam (2017:85). Subramanyam (2017:87) menyatakan dalam laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan akrual tampak lebih masuk akal dibandingkan dengan pencatatan menurut akuntansi kas. Namun demikian, ada ketidakpastian dengan angka akrual tersebut. Angka tersebut kurang

konkret jika dibandingkan dengan arus kas – tergantung pada asumsi-asumsi. Fitur menarik tentang arus kas adalah kemudahannya. Arus kas mudah dipahami dan dihitung langsung. Arus kas juga merupakan sesuatu yang berwujud dan pasti. Arus kas tampak seperti hal yang nyata-bukan hasil kreasi metode akuntansi. Akan tetapi sayangnya, ketika mengukur kapasitas penghasil kas perusahaan, penggunaan arus kas sangat terbatas.

Akuntansi akrual bertujuan menginformasikan pengguna mengenai konsekuensi aktivitas bisnis untuk arus kas masa depan perusahaan secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang wajar. Hal ini dapat dicapai dengan pengakuan pendapatan yang diterima dan beban yang terjadi, tanpa memperhatikan apakah arus kas terjadi bersamaan atau tidak. Pemisahan pengakuan pendapatan dan beban dari arus kas ini difasilitasi dengan penyesuaian akrual, yang menyesuaikan arus kas masuk dan arus kas keluar untuk menghasilkan pendapatan dan beban. Penyesuaian akrual dicatat setelah membuat asumsi dan estimasi yang wajar, tanpa mengorbankan keandalan informasi akuntansi secara material. Oleh karena itu, penilaian merupakan bagian penting dari akuntansi akrual, serta aturan dan mekanisme kelembagaan ada untuk memastikan keandalannya

Pada model akrual, kualitas pelaporan keuangan dikaitkan dengan dengan praktik penerapan manajemen laba (*earning management*). Dalam model ini diasumsikan bahwa manajemen menerapkan *discretionary*

accrual, yang mana manajer memiliki kekuasaan untuk mengelola laba. Manajemen laba memiliki hubungan negatif dengan kualitas pelaporan keuangan karena mengurangi kegunaan informasi laporan keuangan bagi pengambilan keputusan. Dalam model ini kualitas pelaporan keuangan diuji dengan menganalisis apakah manajemen mempraktikkan manajemen laba atau tidak. Semakin rendah tingkat manajemen laba yang dipraktikkan manajemen, akan semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan tersebut.

Kualitas pelaporan keuangan, dalam model akrual, diuji dengan menganalisis apakah manajemen mempraktikkan manajemen laba atau tidak. Manajemen laba memiliki hubungan negatif dengan kualitas pelaporan keuangan karena mengurangi kegunaan informasi laporan keuangan. Semakin rendah tingkat manajemen laba yang dipraktikkan manajemen, akan semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan tersebut. (Yadiati dan Mubarak, 2017)

Menurut Supriyono (2018:123), manajemen laba merupakan semua tindakan yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi laba dengan cara meninggi-ningikan atau merendah-rendahkan laba sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya menurut Hery (2015:50) manajemen laba dapat diartikan sebagai sebuah trik akuntansi dimana fleksibilitas dalam penyusunan laporan keuangan digunakan atau dimanfaatkan oleh manajer yang berusaha untuk memenuhi target laba. Manajemen laba terjadi apabila manajer menggunakan kreativitasnya dalam penyusunan laporan

keuangan dan mengatur transaksi untuk merubah laporan keuangan dengan tujuan memberi kesan tertentu atau mempengaruhi tindakan para *stakeholders* yang bergantung pada laporan keuangan tersebut

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai “intervensi dengan tujuan tertentu oleh manajemen dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuannya sendiri” (Schipper, 1989). Manajemen laba sering melibatkan *window-dressing* atas laporan keuangan, khususnya jumlah laba *bottom-line*. Manajemen laba dapat berupa *cosmetic*, jika manajer memanipulasi akrual tidak memiliki konsekuensi arus kas, manajemen laba juga dapat menjadi *real*, jika manajer mengambil tindakan terkait dengan konsekuensi arus kas untuk tujuan mengelola laba. Manajemen laba kosmetik (*cosmetics earnings management*) merupakan hasil potensial dari kebebasan dalam menerapkan akuntansi akrual. Standar akuntansi dan mekanisme pengawasan mengurangi kebebasan ini. Namun, tidak mungkin untuk menghilangkan kebebasan tersebut karena kompleksitas dan variasi dalam aktivitas bisnis. Bahkan, akuntansi akrual memerlukan perkiraan dan penilaian. Hal ini menyebabkan kebijakan manajerial dalam menentukan angka akuntansi. Meskipun kebijakan ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk mengungkapkan gambaran yang lebih informatif mengenai aktivitas bisnis perusahaan, tetapi memungkinkan bagi mereka untuk melakukan *window-dressing* atas laporan keuangan dan mengelola laba. Subramanyam, (2014:117).

Manajemen laba mungkin merupakan hasil dari akuntansi akrual yang paling bermasalah. Penggunaan penilaian dan estimasi dalam akuntansi akrual memungkinkan manajer untuk menggunakan informasi dalam (*inside information*) dan pengalamannya mereka untuk meningkatkan kegunaan angka akuntansi. Akan tetapi, beberapa manajer menggunakan kebijakannya untuk mengelola angka akuntansi, khususnya laba, untuk keuntungan pribadi, sehingga mengurangi kualitas labanya.

Menurut Hery (2015:51) terdapat 4 (empat) alasan yang membuat manajer melakukan manajemen laba, yaitu untuk memenuhi target internal, memenuhi harapan eksternal, memberikan perataan laba (*income smoothing*), dan agar laporan keuangan seolah olah tampak baik (*window dressing*) demi kepentingan penawaran saham perdana ke public atau mendapatkan pinjaman. Manajemen laba juga dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi harapan pihak eksternal perusahaan, seperti investor dan kreditor. Pihak eksternal ini memiliki kepentingan atas kinerja keuangan perusahaan, dimana mereka menginginkan agar perusahaan dapat beroperasi dengan hasil yang baik. Manajemen laba juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan perataan laba. Praktik penentuan waktu pengakuan pendapat dan beban secara hati-hati untuk meratakan jumlah laba yang dilaporkan dari satu periode ke periode berikutnya dinamakan sebagai perataan laba (*income smoothing*). Perataan laba ini sering

dilakukan dengan tujuan (diantaranya) adalah agar menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman kreditor dan menarik investor.

Dalam penelitian ini, kualitas pelaporan keuangan diproksikan dengan praktik manajemen laba. Pengukuran praktik manajemen laba menggunakan Model McNichols (2002). Model McNichols (2002) dalam Klai dan Omri (2011) mempertimbangkan standar deviasi residual atau istilah kesalahan sebagai ukuran kualitas pelaporan. Nilai besar dari residual model mengartikan tingkat akrual diskresioner yang cukup besar dan kualitas informasi keuangan yang buruk. Persamaan model adalah sebagai berikut

$$\frac{ACCR_{it}}{TA_{it-1}} = \frac{\alpha_0}{TA_{it-1}} + \frac{\alpha_1 CF_{it-1}}{TA_{it-1}} + \frac{\alpha_2 CF_{it}}{TA_{it-1}} + \frac{\alpha_3 CF_{it+1}}{TA_{it-1}} + \frac{\alpha_4 \Delta REV_{it}}{TA_{it-1}} + \frac{\alpha_5 PPE_{it}}{TA_{it-1}} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :
 $ACCR_{it}$: total current acrual,
 CF_{it} : arus kas operasi periode berjalan,
 CF_{it-1} : arus kas operasi periode sebelumnya,
 CF_{it+1} : arus kas operasi periode berikutnya,
 Δrev_{it} : perubahan pendapatan dan
 PPE_{it} : tingkat properti, pabrik dan peralatan.
 Semua variabel ini diskalakan oleh total aset yang tertinggal (TA_{it-1}).

2. Model value relevan (*value relevance models*)

Model (studi) relevansi nilai merupakan bagian dari studi akuntansi berbasis pasar modal (*capital market-based studies in accounting*). Barth *et al.* (2000;2001) menjelaskan banyak literatur yang mengartikan elevansi

nilai sebagai hubungan antara angka-angka akuntansi (*accounting amounts*) dan nilai surat pasar berharga (*security market value*).

Penelitian tentang relevansi nilai menguji kegunaan informasi akuntansi dari perspektif investor ekuitas (pemegang saham). Penelitian ini menginvestigasi secara empiris kegunaan informasi akuntansi bagi investor ekuitas. Informasi akuntansi dianggap memiliki relevansi jika memiliki hubungan statistik antara angka-angka akuntansi tersebut dan nilai pasar saham.

Dalam literatur, suatu angka-angka akuntansi dikatakan relevan nilai jika mempunyai hubungan yang diprediksikan dengan nilai pasar ekuitas (Amir *et al.*, 1993; Beaver, 1998). Bagi para peneliti, tujuan melakukan pengujian relevansi nilai adalah memperluas pengetahuan tentang relevansi dan reliabilitas angka-angka akuntansi yang tercermin dalam nilai ekuitas. Relevansi nilai merupakan operasionalisasi empiris kriteria relevansi dan reliabilitas. Suatu angka-angka akuntansi akan relevan, mempunyai hubungan signifikan (yang diprediksi) dengan harga saham, jika angka-angka akuntansi mencerminkan informasi yang relevan bagi investor dalam menilai suatu perusahaan dan diukur dengan cukup layak (*reliable*) agar tercermin dalam harga saham (Barth *et al.*, 2001). Secara umum ada tiga jenis penelitian relevansi nilai, yaitu : (a). Studi hubungan relative (*“relative” association studies*); (b). Studi hubungan incremental (*incremental association studies*); (c). Studi tentang konten informasi marginal (*studies containing marginal information*)

Penelitian relevansi nilai informasi akuntansi umumnya dilakukan dengan menggunakan model yang diperkenalkan oleh Ohlson (1995). Model Ohlson menggambarkan hubungan antara nilai pasar perusahaan (harga saham) dengan laba dan nilai buku serta informasi lain yang diduga dapat mempengaruhi harga saham. Terdapat dua tipe model penilaian yang umumnya digunakan untuk menginvestigasi hubungan antara informasi akuntansi dengan harga saham, yaitu model harga (*price model*) dan model return (*return model*). Model Ohlson (1995) pada dasarnya menghubungkan nilai pasar perusahaan (harga saham) dengan laba dan nilai buku serta informasi lain yang dapat mempengaruhi relevansi nilai informasi akuntansi. Model penilaian ini diperlukan untuk membuktikan hubungan antara informasi akuntansi dengan harga atau perubahan harga saham. (Syagata, 2014).

3. Model penelitian yang mengkhususkan pada unsur-unsur tertentu dalam laporan tahunan (*research focusing on specific elements in the annual report*)

Dalam model pengujian yang memfokuskan pada komponen tertentu dalam laporan keuangan, peneliti mencoba mengevaluasi pengaruh penyajian informasi tertentu dalam laporan keuangan terhadap keputusan informasi. Informasi tertentu meliputi informasi keuangan dan non keuangan seperti *corporate governance, fair value, internal control, risk disclosure information, auditor's reports*, dan lain-lain. Yadiati dan Mubarak (2017:54)

4. Model yang mengoperasionalkan karakteristik kualitatif laporan keuangan
(*methods operationalizing the qualitative characteristics*)

Model yang mengoperasionalkan karakteristik kualitatif laporan keuangan (*Method Operationalizing the Qualitative Characteristic*). Dalam model ini, kualitas pelaporan keuangan diuji dengan mengoperasionalkan komponen-komponen karakteristik kualitatif informasi keuangan dalam bentuk kuesioner pertanyaan yang akan diajukan ke responden (Jonas dan Blanchet, 2000; Mahdavikhou dan Khotanlou, 2011; Melhami et al., 2013 ; Van Beest, 2009 ; Braam dan van Beest, 2013a ; 2013b).

Ada dua jenis karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu *fundamental qualitative characteristic* dan *enhancing qualitative characteristic* (Ernst & Young, 2010 dan KPMI, 2010). *Fundamental qualitative characteristic* meliputi relevansi (*relevance*) dan penyajian jujur (*faithfull representation*), sedangkan *enhancing qualitative characteristic* meliputi dapat dibandingkan (*comparability*), ketepatan waktu (*timeliness*), dapat diverifikasi (*verifiability*) dan dapat dipahami (*understandbilty*).

9. Penelitian Terdahulu

Tua (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh *good governance*, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan (studi empiris pada skpd kota dumai). Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel *good governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini

mengindikasikan bahwa semakin berjalan penerapan *good governance* maka kualitas informasi laporan keuangan tersebut akan semakin baik. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa semakin kompetennya sumber daya manusia maka kualitas informasi laporan keuangan yang akan dihasilkan akan semakin baik pula. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka kualitas informasi laporan keuangan tersebut akan semakin baik.

Klai and Omri (2011) melakukan penelitian tentang *Corporate Governance and Financial Reporting Quality: The Case of Tunisian Firms*. Hasil penelitian menyatakan Secara keseluruhan, peneliti menemukan bahwa mekanisme governance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan Tunisia. Selanjutnya, hasil menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan mempengaruhi kualitas informasi keuangan dari perusahaan Tunisia. Khususnya, kekuatan asing, keluarga dan *blockholders* mengurangi kualitas pelaporan, sedangkan pengendalian yang dilakukan oleh Negara dan lembaga keuangan dikaitkan dengan kualitas yang baik dari pengungkapan keuangan.

Fathi (2013) melakukan penelitian tentang *Corporate Governance System and Quality of Financial Information*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas

informasi keuangan berhubungan positif dengan kualitas struktur kepemilikan. Penggunaan indeks tata kelola keseluruhan memberikan hasil yang lebih signifikan untuk ketiga model dan menegaskan hubungan positif antara kualitas sistem tata kelola dan kualitas pelaporan keuangan.

Yasmeen dan Hermawati (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur. *Good corporate governance* diukur dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris dan variabel pendukungnya berupa umur perusahaan (*Age*) dan leverage perusahaan dan Kualitas Pelaporan keuangan diukur melalui kuesioner yang disebarakan sebanyak 65 responden. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kepemilikan institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, dan *Age* (umum perusahaan) tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan Leverage berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan

Iswara (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan non keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis regresi berganda. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Keberadaan

komisaris independen mampu menciptakan kontrol atas tindakan manajemen. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh manajer selaku pengelola dan pemegang saham, serta oleh pihak luar perusahaan harus terus ditingkatkan untuk mengurangi potensi terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel umur perusahaan, jenis industri, kualitas audit, leverage, likuiditas dan growth sebagai variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Meliani (2018) melakukan penelitian mengenai penerapan mekanisme *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dilihat dari *Earning Management* dan *Earnings Response Coefficient*, kecuali *Board Size* berpengaruh terhadap *Earnings Response Coefficient*. Berdasarkan hasil pengujian terhadap penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hanya mekanisme *Good Corporate Governance* yaitu jumlah dewan komisaris, berpengaruh positif terhadap *Earnings Response Coefficient* (ERC)

Kaklar, Kangarlouei, dan Motavassel (2012) melakukan penelitian tentang *Audit Quality and Financial Reporting Quality: Case of Tehran Stock Exchange (TSE)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang lemah dan

negatif antara ukuran perusahaan audit dan kualitas pelaporan keuangan. Ketika audit dilakukan oleh *Iranian audit organization*, kualitas pelaporan keuangan berkurang. Namun, tidak ada hubungan yang ditemukan antara rotasi auditor dan kualitas pelaporan keuangan. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mendapatkan peringkat kualitas pengungkapan yang baik oleh akuntan publik bersertifikat untuk lembaga audit telah dilakukan dengan akurasi yang baik. Karena auditor adalah perusahaan yang berkualitas tinggi untuk mengungkapkan informasi mereka cukup untuk tidak mempertanyakan kualitas dan kredibilitas.

Nwanyanmu (2017) melakukan penelitian tentang *Audit Quality Practices and Financial Reporting in Nigeria*. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang secara statistik kuat positif secara signifikan antara ukuran kualitas audit (independensi auditor, pelatihan teknis dan kemampuan dan kinerja keterlibatan) dan pelaporan keuangan (diukur dalam hal keandalan laporan keuangan). Independensi auditor memiliki kekuatan penjelas variasi tertinggi dalam keandalan laporan keuangan sebesar 47,9%. Selain itu, model regresi dengan independensi auditor hanya menghasilkan nilai keandalan laporan keuangan tertinggi. Mengingat adanya pelatihan teknis dan kinerja kemahiran dan keterlibatan, independensi auditor adalah kualitas audit utama dalam pelaporan keuangan. Praktisi akuntansi harus menyerap etika independensi untuk mencapai kredibilitas dan reliabilitas yang disyaratkan laporan keuangan

Defond, & Zhang (2014:275) dalam Djanegara (2017) berpendapat bahwa semakin tinggi kualitas audit semakin tinggi kualitas laporan keuangan, karena

kualitas audit akan memperbaiki kredibilitas laporan keuangan, karena sejalan dengan pendapat Deloitte (2015:54-55) bahwa *“Audit findings help improve the financial statements to enable full compliance with IPSAS”*. Dengan kata lain kualitas audit adalah bagian dari komponen kualitas pelaporan keuangan (Defond, & Zhang, 2014:276). Tanggung jawab kualitas audit atas laporan keuangan terletak pada auditor. Akan tetapi, kualitas audit hanya akan terealisasi dengan baik apabila didukung sistem pelaporan keuangan dan karakteristik lingkungan di dalam entitas, karena kedua faktor tersebut seringkali menghambat tercapainya kualitas laporan keuangan (IFAC, 2014:4; Defond, & Zhang, 2014:276). Djanegara (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa tindak lanjut perbaikan atas kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan didukung secara empiris. Koefisien X1 nilainya positif yang berarti semakin baik tindak lanjut perbaikan atas kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan maka kualitas pelaporan keuangan juga akan meningkat. Hipotesis kedua yaitu tindak lanjut perbaikan atas kelemahan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien X2 bernilai positif menunjukkan semakin baik tindak lanjut perbaikan atas kelemahan pelaksanaan anggaran maka akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hipotesis ketiga yaitu tindak lanjut perbaikan atas kelemahan struktur pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai koefisien X3 adalah positif maka tindak lanjut perbaikan atas

kelemahan struktur pengendalian intern akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hipotesis keempat yaitu tindak lanjut perbaikan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien X4 positif yang menunjukkan semakin baik tindak lanjut perbaikan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hasil penelitian keseluruhan dapat dinyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penyelesaian atau tindak lanjut perbaikan atas kelemahan pengendalian intern kualitas LKPD semakin meningkat.

Christiani dan Nugrahanti (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. Kualitas audit pada penelitian ini diukur dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi big four dan non-big four dan spesialisasi industri auditor. Penelitian ini menggunakan empat variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, leverage, rasio arus kas operasi dan pertumbuhan perusahaan. Kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP, dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dimungkinkan praktik manajemen laba terjadi karena perusahaan memiliki keinginan agar kinerja keuangan perusahaan tampak bagus dimata calon investor, namun mengabaikan keberadaan auditor Big-4 (Luhglatno 2010). Selain itu, dengan adanya keberadaan auditor Big4 bukan untuk mengurangi manajemen laba, tetapi lebih kepada peningkatan kredibilitas laporan keuangan dengan

mengurangi gangguan yang ada didalamnya sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih handal (Cahyonowati 2006).

Raharjo (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kualitas pelaporan keuangan dan dampaknya terhadap efisiensi investasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari tiga variabel yang dianalisis, hanya variabel monitoring dan kinerja yang terbukti mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel monitoring dan kinerja menjadi faktor yang dipertimbangkan manajemen dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan. Adapun variabel struktur perusahaan tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa hutang perusahaan, sebagai proksi struktur perusahaan bukan faktor yang dipertimbangkan manajemen dalam menyusun laporan keuangan secara berkualitas. Terkait dengan efisiensi investasi, secara umum dari empat variabel independen yang dianalisis (struktur, monitoring, kinerja, kualitas pelaporan keuangan) tidak berpengaruh secara langsung terhadap efisiensi investasi. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut bukan faktor yang dipertimbangkan manajemen dalam mengelola investasi aset tetap secara efisien. Meskipun demikian, dalam pengaruh tidak langsung, variabel monitoring dan kinerja terbukti mempengaruhi efisiensi investasi. Kedua variabel tersebut mempengaruhi efisiensi investasi melalui kualitas pelaporan keuangan.

Nelson M. Waweru dan George K. Riro (2013) melakukan penelitian tentang *Corporate Governance, Firm Characteristics and Earnings Management in an*

Emerging Economy. Hasil penelitian menyatakan bahwa beberapa karakteristik perusahaan yang mempengaruhinya antara lain konsentrasi kepemilikan, komite audit independen, komposisi dewan, Leverage, direksi independen, kepemilikan saham institusi dan manajemen, sedangkan kualitas pelaporan keuangan diprosikan dengan manajemen laba dan tingkat keluasan disklosur. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada pihak tertentu lebih memungkinkan melakukan praktik manajemen laba. Komite audit independen dan anggota dewan yang berasal dari luar eksekutif juga cenderung membatasi perusahaan untuk melakukan praktik manajemen perusahaan

Dhaneswari dan Widuri (2013) melakukan penelitian dengan judul pengaruh asimetri informasi, ukuran perusahaan dan beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba di perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2010-2012. Pada penelitian ini asimetri informasi diprosikan atas *bid-ask spread* dan mendapatkan hasil bahwa variabel asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan laba pada manajemen laba, sehingga dapat diartikan bahwa jika terdapat asimetri informasi yang tinggi maka akan mempengaruhi adanya peningkatan laba dalam manajemen laba.

Andika dan Sukartha (2015) meneliti pengaruh asimetri informasi dan kepemilikan manajerial pada praktek manajemen laba. Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif pada praktek manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi semakin tinggi peluang yang dimiliki manajer untuk

melakukan praktek manajemen laba. Asimetri informasi secara positif berpengaruh dan variabel kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh pada praktek manajemen laba. Oleh sebab itu, disarankan agar pemilik atau pemegang saham mayoritas suatu perusahaan agar ikut serta mengelola dan menjadi bagian dari manajemen perusahaan agar tidak terjadi ketimpangan informasi antara pemilik dan manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi terjadinya praktek manajemen laba

Dadbeh dan Mogharebi (2013) melakukan penelitian dengan judul *A study on effect of information asymmetry on earning management: Evidence from Tehran Stock Exchange*. Dalam tulisan ini, peneliti menguji pengaruh asimetri informasi pada manajemen laba. Untuk menguji hipotesis penelitian, digunakan sampel 47 perusahaan yang terdaftar di Bursa Teheran selama periode 2002-2008 berdasarkan data panel telah diambil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi memiliki beberapa pengaruh yang berarti pada manajemen laba. Penelitian ini telah meneliti pengaruh asimetri informasi pada manajemen laba dengan proksi *bid-ask spread* dan peneliti telah menguji asimetri informasi dengan model dan variabel lain. Peneliti juga meneliti pengaruh asimetri informasi pada nilai perusahaan, diversifikasi perusahaan dan tata kelola perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh pada manajemen laba.

Barus dan Setiawati (2015) melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Asimetri Informasi, Mekanisme Corporate Governance, dan Beban Pajak*

Tanggungan terhadap Manajemen Laba. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa asimetri informasi, mekanisme *corporate governance*, dan beban pajak tanggungan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 – 2012. Namun secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan asimetri informasi, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan beban pajak tanggungan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Setiany dan Wulandari (2015) melakukan penelitian dengan judul Kualitas Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi di Industri Manufaktur Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bukti bahwa kualitas pelaporan keuangan (relevansi nilai) berpengaruh negatif signifikan terhadap informasi asimetri (SPREAD). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelaporan keuangan terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat asimetri informasi. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelaporan keuangan terbukti mampu menurunkan tingkat asimetri informasi.

Berikut penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya digambarkan dalam sebuah tabel.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu



NO	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Media Publikasi	Hasil Penelitian
1	Tua (2015)	Pengaruh <i>Good Governance</i> , Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Dumai)	Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015	<p>Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel <i>good governance</i> berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin berjalan <i>penerapan good governance</i> maka kualitas informasi laporan keuangan tersebut akan semakin baik. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa semakin kompetennya sumber daya manusia maka kualitas informasi laporan keuangan yang akan dihasilkan akan semakin baik pula.</p> <p>Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka kualitas informasi laporan keuangan tersebut akan semakin baik.</p>
2	Klai and Omri (2011)	<i>Corporate Governance and Financial Reporting Quality: The Case of Tunisian Firms</i>	<i>International Business Research Vol. 4, No. 1; January 2011</i>	<p>Secara keseluruhan, Peneliti menemukan bahwa mekanisme <i>governance</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan Tunisia.</p> <p>Hasil menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan mempengaruhi kualitas informasi keuangan dari perusahaan Tunisia. Khususnya, kekuatan kepemilikan oleh asing, keluarga dan blockholders mengurangi kualitas pelaporan, sedangkan pengendalian oleh Negara dan lembaga keuangan dikaitkan dengan kualitas yang baik dari pengungkapan keuangan.</p>

3	Fathi (2013)	<i>Corporate Governance System and Quality of Financial Information</i>	ISSN 2039-2117 (online) ISSN 2039-9340 (print) <i>Mediterranean Journal of Social Sciences</i> Published by MCSER-CEMAS-Sapienza University of Rome Vol 4 No 2 May 2013	<p>Kualitas informasi keuangan diperkirakan oleh akrual diskresioner. Tata kelola perusahaan dihargai oleh indeks global dengan 64 item dan tiga sub-indeks yang berkaitan dengan karakteristik dewan komisaris, struktur kepemilikan, dan kualitas sistem pengendalian.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan berhubungan positif dengan kualitas dewan komisaris dan kualitas struktur kepemilikan. Penggunaan indeks tata kelola secara keseluruhan memberikan hasil yang lebih signifikan untuk ketiga model dan menegaskan hubungan positif antara kualitas sistem tata kelola dan kualitas pelaporan keuangan.</p>
4	Yasmeen dan Hermawati (2015)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur	Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 20 No. 1, April 2015	<p><i>Good corporate governance</i> diukur dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris dan variabel pendukungnya berupa umur perusahaan (Age) dan leverage perusahaan dan Kualitas Pelaporan keuangan diukur melalui kuesioner yang disebarkan sebanyak 65 responden.</p> <p>Hasil penelitian menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, dan Age (umum perusahaan) tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan Leverage berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan</p>

5	Iswara (2016)	<p>PENGARUH MEKANISME <i>CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN</p>	<p>Iswara, Pengaruh Mekanisme Corporate... ISSN : 1412- 5366 e-ISSN : 2459-9816</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme <i>corporate governance</i> yang terdiri dari proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.</p> <p>Hal ini dibuktikan dari hasil analisis regresi berganda. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Keberadaan komisaris independen mampu menciptakan kontrol atas tindakan manajemen. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh manajer selaku pengelola dan pemegang saham, serta oleh pihak luar perusahaan harus terus ditingkatkan untuk mengurangi potensi terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel umur perusahaan, jenis industri, kualitas audit, leverage, likuiditas dan growth sebagai variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan.</p>
---	---------------	---	---	--

MERCU BUANA

6	Kaklar, Kangarlouei, dan Motavassel (2012)	<i>Audit Quality and Financial Reporting Quality: Case of Tehran Stock Exchange (TSE)</i>	<i>INNOVATIVE JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT 1:3 May-June (2012) 43-47</i>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang lemah dan negatif antara ukuran perusahaan audit dan kualitas pelaporan keuangan. Ketika audit dilakukan oleh <i>Iranian Audit Organization</i>, kualitas pelaporan keuangan berkurang.</p> <p>Hubungan antara kualitas audit institusional dan kualitas informasi dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan peringkat kualitas pengungkapan yang baik, audit dilakukan oleh akuntan publik bersertifikat karena telah dilakukan dengan akurasi yang baik. Selain itu, karena auditor adalah perusahaan yang berkualitas tinggi dan mampu mengungkapkan informasi cukup sehingga tidak dipertanyakan kualitas dan kredibilitas.</p>
7	NWANYAN WU (2017)	<i>Audit Quality Practices and Financial Reporting in Nigeria</i>	<i>International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Vol. 7, No.2, April 2017, pp. 145– 155 E-ISSN: 2225-8329, P- ISSN: 2308- 0337</i>	<p>Penelitian ini meneliti pengaruh praktik kualitas audit pada pelaporan keuangan di Nigeria, menarik bukti dari perusahaan audit. Data dikumpulkan melalui kuesioner.</p> <p>Temuan menunjukkan hubungan yang secara statistik kuat positif secara signifikan antara ukuran kualitas audit (independensi auditor, pelatihan teknis dan kemampuan dan kinerja keterlibatan) dan pelaporan keuangan (diukur dalam hal keandalan laporan keuangan). Independensi auditor memiliki kekuatan penjas variasi tertinggi dalam keandalan laporan keuangan sebesar 47,9%.</p>

8	Meliani (2018)	<p>PENERAPAN MEKANISME <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2015</p>	<p>Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.1 (2018)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dilihat dari <i>Earning Management</i> dan <i>Earnings Response Coefficient</i>, kecuali <i>Board Size</i> berpengaruh terhadap <i>Earnings Response Coefficient</i>.</p> <p>Berdasarkan hasil pengujian terhadap penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hanya mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> yaitu jumlah dewan komisaris, berpengaruh positif terhadap <i>Earnings Response Coefficient</i> (ERC)</p>
9	Djanegara (2017)	<p>PENGARUH KUALITAS AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</p>	<p>Jurnal Akuntansi/Volu me XXI, No. 03, September 2017: 461-483</p>	<p>Hasil penelitian keseluruhan dapat dinyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penyelesaian atau tindak lanjut perbaikan atas kelemahan pengendalian intern kualitas LKPD semakin meningkat. Di antara ke empat variabel independen, pengaruh terbesar terhadap peningkatan kualitas LKPD ditunjukkan oleh variabel X1 tingkat penyelesaian atau tindak lanjut perbaikan atas kelemahan pengendalian akuntansi dan pelaporan. Variabel lainnya menunjukkan koefisien yang relatif sama.</p>

10	Raharjo (2017)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan Dampaknya Terhadap Efisiensi Investasi	Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 (2), Oktober 2017 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 391 – 404	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari tiga variabel yang dianalisis, hanya variabel monitoring dan kinerja yang terbukti mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel monitoring dan kinerja menjadi faktor yang dipertimbangkan manajemen dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan.</p> <p>Adapun variabel struktur perusahaan tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa hutang perusahaan, sebagai proksi struktur perusahaan bukan faktor yang dipertimbangkan manajemen dalam menyusun laporan keuangan secara berkualitas</p>
11	Waweru dan Giro (2013)	<i>Corporate Governance, Firm Characteristics and Earnings Management in an Emerging Economy</i>	JAMAR Vol. 11 · No. 1 2013	<p>Beberapa karakteristik perusahaan yang mempengaruhinya antara lain konsentrasi kepemilikan, komite audit independen, komposisi dewan, Leverage, direksi independen, kepemilikan saham institusi dan manajemen, sedangkan kualitas pelaporan keuangan diproksikan dengan manajemen laba dan tingkat keluasaan disklosur. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada pihak tertentu lebih memungkinkan melakukan praktik manajemen laba. Komite audit independen dan anggota dewan yang berasal dari luar eksekutif juga cenderung membatasi perusahaan untuk melakukan praktik manajemen perusahaan</p>

12	Christiani dan Nugrahanti (2014)	Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 16, No. 1, Mei 2014, 52-62 ISSN 1411-0288 print / ISSN 2338-8137 online	<p>Kualitas audit pada penelitian ini diukur dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi big four dan non-big four dan spesialisasi industri auditor. Penelitian ini menggunakan empat variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, leverage, rasio arus kas operasi dan pertumbuhan perusahaan</p> <p>Kualitas audit yang diprosikan dengan ukuran KAP, dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dimungkinkan praktik manajemen laba terjadi karena perusahaan memiliki keinginan agar kinerja keuangan perusahaan tampak bagus dimata calon investor, namun mengabaikan keberadaan auditor Big-4 (Luhglatno 2010)</p> <p>Selain itu, dengan adanya keberadaan auditor Big4 bukan untuk mengurangi manajemen laba, tetapi lebih kepada peningkatan kredibilitas laporan keuangan dengan mengurangi gangguan yang ada didalamnya sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih handal (Cahyonowati 2006).</p>
13	Dhaneswari dan Widuri (2013)	Pengaruh asimetri informasi, ukuran perusahaan dan beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba di perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (bei) 2010-2012.	TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013	<p>Pada penelitian ini asimetri informasi diprosikan atas <i>bid-ask spread</i> dan mendapatkan hasil bahwa variabel asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan laba pada manajemen laba, sehingga dapat diartikan bahwa jika terdapat asimetri informasi yang tinggi maka akan mempengaruhi adanya peningkatan laba dalam manajemen laba.</p>
14	Andika dan Sukartha (2015)	Pengaruh asimetri informasi dan kepemilikan manajerial pada praktek manajemen laba	ISSN: 2303-1018 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.13.3 Desember (2015): 1057-1069	<p>Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif pada praktek manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi semakin tinggi peluang yang dimiliki manajer untuk melakukan praktek manajemen laba.</p>

15	Dadbeh and Mogharebi (2013)	<i>A study on effect of information asymmetry on earning management: Evidence from Tehran Stock Exchange</i>	<i>Management Science Letters 3 (2013) 2161–2166</i>	<p>Dalam tulisan ini, kami menguji pengaruh asimetri informasi pada manajemen laba. Untuk menguji hipotesis penelitian, sampel 47 perusahaan yang terdaftar di Bursa Teheran. Pertukaran selama periode 2002-2008 berdasarkan data panel telah diambil.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi memiliki pengaruh yang berarti pada manajemen laba.</p>
16	Barus dan Setiawati (2015)	<i>Pengaruh Asimetri Informasi, Mekanisme Corporate Governance, dan Beban Pajak Tanggahan terhadap Manajemen Laba</i>	<i>Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Volume 5, Nomor 01, Oktober 2015</i>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa asimetri informasi, mekanisme <i>corporate governance</i>, dan beban pajak tanggahan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 – 2012.</p> <p>Namun secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan asimetri informasi, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan beban pajak tanggahan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba</p>
17	Setiany dan Wulandari (2015)	Kualitas Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi di Industri Manufaktur Indonesia.	<i>EFEKTIF Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol 6 No. 2 Desember 2015 17-24</i>	<p>Hasil pengujian diperoleh bukti bahwa kualitas pelaporan keuangan (relevansi nilai) berpengaruh negatif signifikan terhadap informasi asimetri (SPREAD). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelaporan keuangan terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat asimetri informasi.</p>

Sumber : data yang diolah

B. RERANGKA PEMIKIRAN

1. Mekanisme *good corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan

Klai and Omri (2011) melakukan penelitian tentang *Corporate Governance and Financial Reporting Quality: The Case of Tunisian Firms*. Hasil penelitian menyatakan secara keseluruhan, Peneliti menemukan bahwa mekanisme *governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan Tunisia. Selanjutnya, hasil menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan mempengaruhi kualitas informasi keuangan dari perusahaan Tunisia. Khususnya, pengendalian oleh kepemilikan asing, keluarga dan blockholders mengurangi kualitas pelaporan, sedangkan pengendalian oleh Negara dan lembaga keuangan dikaitkan dengan kualitas yang baik dari pengungkapan keuangan.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswara (2016). Iswara (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan non keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis regresi berganda. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan

keuangan. Keberadaan komisaris independen mampu menciptakan kontrol atas tindakan manajemen. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh manajer selaku pengelola dan pemegang saham, serta oleh pihak luar perusahaan harus terus ditingkatkan untuk mengurangi potensi terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel umur perusahaan, jenis industri, kualitas audit, leverage, likuiditas dan growth sebagai variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meliani (2015). Meliani (2015) melakukan penelitian dengan judul penelitian penerapan mekanisme *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dilihat dari *Earning Management* dan *Earnings Response Coefficient*, kecuali *Board Size* berpengaruh terhadap *Earnings Response Coefficient*. Berdasarkan hasil pengujian terhadap penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hanya mekanisme *Good Corporate Governance* yaitu jumlah dewan komisaris, berpengaruh positif terhadap *Earnings Response Coefficient* (ERC).

Salah satu peran penting tata kelola perusahaan adalah memastikan kualitas pelaporan keuangan (Cohen *et al.*, 2004). Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang efektif akan terjadi kejelasan peran dan hubungan antara berbagai fungsi internal perusahaan, yang apabila dilaksanakan secara efektif akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan

Sistem tata kelola perusahaan juga dapat menjadikan peran pelaporan keuangan lebih efektif (Shah *et al.*, 2009). Laporan keuangan ditunjukkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Peran tata kelola perusahaan terkait dengan kualitas pelaporan keuangan dalam hal ini adalah mengidentifikasi kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan, yang kepadanya pelaporan keuangan ditunjukkan

Istilah tata kelola perusahaan pada awalnya lebih menekankan pada perlindungan kepada investor (pemegang saham). Pada saat itu tata kelola perusahaan diartikan sebagai suatu mekanisme yang dirancang dan dirumuskan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar kepentingan dan tujuan pemegang saham terlindungi dan tercapai.

Salah satu upaya untuk menciptakan pelaporan keuangan yang berkualitas dan mewujudkan bisnis yang sehat serta bertanggung jawab adalah membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif. Sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif akan menghambat manajemen untuk menyembunyikan, mengubah, dan menunda informasi yang seharusnya diketahui oleh publik. Selain

itu, dengan sistem tersebut akan mendorong manajemen untuk selalu mempertanggung jawabkan semua keputusan-keputusan yang dibuatnya dan mendorong manajemen untuk melakukan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar pemikiran ini maka dalam menciptakan pengelolaan perusahaan yang bertanggungjawab diperlukan adanya pihak yang berperan sebagai pengawas dan pengendali tindakan dan keputusan manajer perusahaan. Dengan demikian, dalam prinsip *good corporate governance* ditekankan pentingnya keberadaan komite audit dan komisaris independen sebagai pengawas dan pengendali sebuah perusahaan

Komite audit merupakan pihak yang memiliki tugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit. Sedangkan komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya *good corporate governance* untuk menjamin bahwa transparansi dan keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua stakeholder, dan pengungkapan semua informasi meskipun adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan agen

2. Kualitas audit berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan

Djanegara (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian keseluruhan dapat dinyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi

tingkat penyelesaian atau tindak lanjut perbaikan atas kelemahan pengendalian intern kualitas LKPD semakin meningkat. Di antara ke empat variabel independen, pengaruh terbesar terhadap peningkatan kualitas LKPD ditunjukkan oleh variabel X1 tingkat penyelesaian atau tindak lanjut perbaikan atas kelemahan pengendalian akuntansi dan pelaporan. Variabel lainnya menunjukkan koefisien yang relatif sama.

Gerayli *et al.* (2011) meneliti dampak kualitas audit pada manajemen laba (*discretionary accruals*), dengan sampel 90 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Iran 2004-2009. Kualitas audit diukur dengan menggunakan tiga ukuran, yaitu ukuran auditor, spesialisasi industri auditor, dan independensi auditor. Secara keseluruhan, studi ini memberikan bukti bahwa praktik manajemen laba berkurang pada perusahaan yang diaudit oleh auditor yang berkualitas tinggi. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Becker *et al.*, (1998) menguji hubungan antara kualitas audit dengan manajemen laba. Kualitas audit diukur dengan menggunakan kantor akuntan enam besar (*the big six auditor*), sebagai ukuran kualitas audit yang lebih tinggi, dan kantor akuntan selain itu (*the non big six auditor*), sebagai ukuran kualitas audit yang lebih rendah. Adapun manajemen laba diukur dengan *accrual discretionary* yang diestimasi menggunakan *cross sectional* model Jones (1991). Hasil mengemukakan bahwa kualitas audit yang rendah mempunyai korelasi dengan fleksibilitas akuntansi atau praktik penerapan manajemen laba yang lebih tinggi.

Selanjutnya, Christiani dan Nugrahanti (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gerayli *et al.* (2011) dan Becker *et al.*, (1998). Hasil penelitian menyatakan bahwa Kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP, dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dimungkinkan praktik manajemen laba terjadi karena perusahaan memiliki keinginan agar kinerja keuangan perusahaan tampak bagus dimata calon investor, namun mengabaikan keberadaan auditor Big-4 (Luhglatno 2010). Selain itu, dengan adanya keberadaan auditor Big4 bukan untuk mengurangi manajemen laba, tetapi lebih kepada peningkatan kredibilitas laporan keuangan dengan mengurangi gangguan yang ada didalamnya sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih handal (Cahyonowati 2006).

Kualitas audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan kualitas audit dapat menjamin kualitas laporan keuangan perusahaan. KAP *big four* lebih mampu mempertahankan independensinya sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang baik, dimana laporan keuangan yang baik akan berguna bagi pihak dalam maupun luar perusahaan untuk pengambilan keputusan perusahaan di masa mendatang.

Hubungan antara kualitas audit dan kualitas informasi dapat disimpulkan untuk mendapatkan peringkat kualitas pengungkapan yang baik, audit dilakukan oleh akuntan publik bersertifikat karena telah dilakukan dengan akurasi yang baik. Selain itu, karena auditor adalah perusahaan yang berkualitas tinggi dan mampu

mengungkapkan informasi cukup sehingga tidak dipertanyakan kualitas dan kredibilitas.

3. Karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan

Raharjo (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan dampaknya terhadap Efisiensi Investasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari tiga variabel yang dianalisis, hanya variabel monitoring dan kinerja yang terbukti mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel monitoring dan kinerja menjadi faktor yang dipertimbangkan manajemen dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan. Adapun variabel struktur perusahaan tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa hutang perusahaan, sebagai proksi struktur perusahaan bukan faktor yang dipertimbangkan manajemen dalam menyusun laporan keuangan secara berkualitas

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nejad et al., (2012). Nejad et al., (2012) melakukan penelitian mengenai *the impact of financial leverage sharp increase on earnings management on the accepted firms in Tehran Stock Exchange*. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan sebagian besar kewajiban menyebabkan penurunan kinerja manajemen laba. Adapun terkait dengan utang perusahaan (*leverage*), karakteristik perusahaan ini juga cenderung mengurangi praktik manajemen laba. Utang perusahaan menyebabkan manajer kurang memiliki akses terhadap aliran kas karena digunakan untuk membayar bunga dan

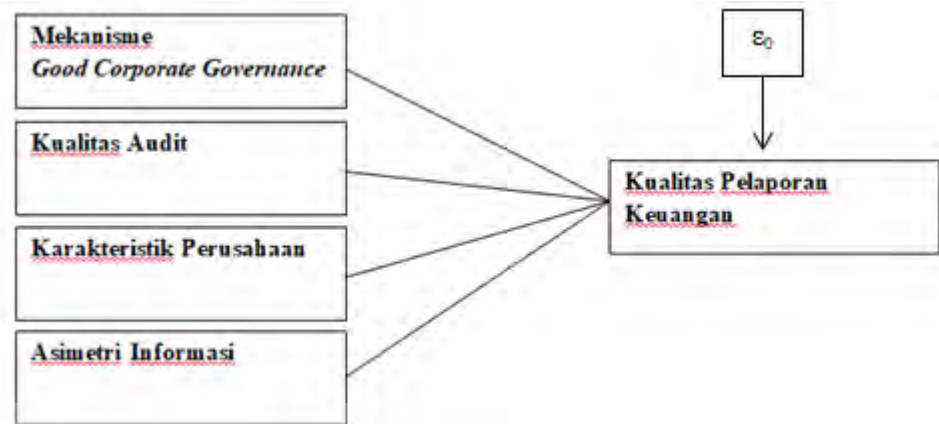
pokok pinjaman. Kenaikan dalam utang akan menaikkan tingkat kepatuhan manajemen terhadap aturan perusahaan, termasuk dalam praktik manajemen laba.

4. Asimetri informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan

Dhaneswari dan Widuri (2013) melakukan penelitian dengan judul pengaruh asimetri informasi, ukuran perusahaan dan beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba di perusahaan manufaktur terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) 2010-2012. Pada penelitian ini asimetri informasi diproksikan atas *bid-ask spread* dan mendapatkan hasil variabel asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan laba pada manajemen laba, sehingga dapat diartikan jika terdapat asimetri informasi yang tinggi maka akan mempengaruhi adanya peningkatan laba dalam manajemen laba.

Selanjutnya, Andika dan Sukartha (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh asimetri informasi dan kepemilikan manajerial pada praktek manajemen laba. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif pada praktek manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi semakin tinggi peluang yang dimiliki manajer untuk melakukan praktek manajemen laba.

Untuk lebih jelasnya, berikut gambar dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya



Gambar 2.1.
Rerangka Pemikiran

C. HIPOTESIS

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- H₁ : Mekanisme *good corporate governance* berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan
- H₂ : Kualitas audit berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan
- H₃ : Karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan
- H₄ : Asimetri informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan